



Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Siaran Pers Nomor: 08/Humas PMK/II/2016

MENKO PMK RESMIKAN POROS SENTRA PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN DAERAH PERBATASAN DI NUNUKAN

Nunukan (16/02) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani meresmikan Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan Daerah Perbatasan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Selasa (15/02). Dalam kesempatan itu, Menko PMK menjelaskan bahwa, kondisi saat ini menunjukkan sekitar 60 % Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang pergi ke Malaysia adalah ilegal dan akan menimbulkan berbagai masalah. Oleh sebab itu, Kemenko PMK meminta semua pihak, baik itu unsur pemerintah, swasta dan TKI di Indonesia maupun Malaysia harus bersama-sama ikut serta dalam merapikan proses penempatan TKI.

Melalui Program Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan Daerah Perbatasan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara ini, Pemerintah berupaya memberikan pelayanan satu atap, yang dimulai dari menyediakan tempat penampungan, mengurus data kependudukan, menerbitkan paspor, mengurus visa, memberikan pelatihan, sampai dengan menempatkan para TKI. Adapun tujuan dari kegiatan ini menurut Menko PMK untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan, serta mendorong semua penempatan TKI secara legal, sehingga dapat mencegah permasalahan-permasalahan yang mungkin akan timbul. Instansi Pemerintah Malaysia juga hendaknya dapat diajak untuk ikut bekerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia dalam mengimplementasikan sistem ini, khususnya dalam menghindari TKI yang ilegal. “Hal ini merupakan wujud program Nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, dimana Negara harus hadir dalam melindungi semua Warga Negara Indonesia (WNI),” tegas Menko PMK.

Menko PMK menambahkan, pemerintah sendiri akan memfasilitasi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan bagi anak TKI bagi para keluarga TKI yang berangkat secara resmi/legal. Dijelaskannya, untuk menciptakan keluarga yang sejahtera melalui Program Pemerintah yang tersedia seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Selain itu, wilayah perbatasan seperti di Nunukan ini perlu diupayakan membangun prasarana dan sarana pendidikan lanjutan untuk menampung anak TKI yang berhasil menyelesaikan pendidikan dasar di wilayah Malaysia yang dilakukan oleh *Humana* maupun *Community Learning Centre (CLC)*. “BNP2TKI dapat segera menyampaikan hasil asesmennya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk ditindaklanjuti,” ujar Menko PMK.

Kemenko PMK, lanjutnya, sangat mengapresiasi kepada BNP2TKI, Pemerintah Daerah setempat, dan seluruh Kementerian /Lembaga (K/L) yang terlibat, serta swasta, yang telah mewujudkan Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan Daerah. Menko PMK berharap, program ini dapat segera diduplikasikan di wilayah perbatasan lainnya, seperti di Batam, Tanjung Pinang, dan Entikong. “Semoga upaya kita bersama dalam meningkatkan kesejahteraan TKI dapat terlaksana dengan baik,” pungkasnya.

Biro Hukum, Informasi dan Persidangan

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

roinfohumas@kemenkopmk.go.id

www.kemenkopmk.go.id